

## EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) DI DPPKBP3A KABUPATEN SUMEDANG

Hilmi Atujahro

Universitas Sebelas April

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received Jul 2, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Nov 30, 2025

---

#### Keywords:

Program effectiveness Family  
planning

Family population development  
and Family Planning.

### ABSTRACT

---

*The effectiveness of the Family Development, Population Control, and Family Planning program needs to be evaluated to measure the extent of achievements in family development, population control, and family planning. This research aims to determine the extent to which the BANGGA KENCANA program implemented by the DPPKBP3A of Sumedang Regency has been carried out, particularly in supporting the improvement of family quality of life and community empowerment based on population data and family welfare. This research uses a qualitative approach. The sampling technique used is purposive sampling. The informants in this study include the Head of Advocacy, Information and Movement, the Head of Family Planning, the Financial and Program Subsection Implementer, and Family Planning Counsellors. The data collection techniques used are literature study and field study which consists of observation, interviews, documentation, and triangulation. Meanwhile, the data processing procedures in this study are data collection, data reduction, and drawing conclusions. Based on the research results then in the data analysis, it was concluded that the effectiveness of the BANGGA KENCANA program at the DPPKBP3A of Sumedang Regency has been implemented quite well, but there are some shortcomings. This can be seen from several factors such as the lack of ability of the program implementers, the understanding of the respondents, the satisfaction of the respondents and the understanding of the program content, the community has not realized the importance of the program, and budget constraints. Based on the research, there are several suggestions including strengthening human resource capacity, weather mitigation, facility improvement, and recruitment and training of cadres.*



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Hilmi Atujahro

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Jln. Angkrek Situ No. 9

Email: [hilmiatujahro02@gmail.com](mailto:hilmiatujahro02@gmail.com)

---

**1. INTRODUCTION**

Keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA), sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Oleh karena itu, program ini menjadi landasan strategis dalam menciptakan keluarga yang mandiri, sehat, dan berkualitas.

Program BANGGA KENCANA dalam konteks pembangunan keluarga dengan kegiatannya adalah terkait dengan upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri di antaranya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Setiap kegiatan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada setiap tahapan kehidupan keluarga, mulai dari masa balita hingga lanjut usia. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, program ini bertujuan menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Program BANGGA KENCANA Kabupaten Sumedang dalam konteks kependudukan memiliki berbagai karakteristik yang dapat dianalisis dari segi kualitas, kuantitas, serta persebaran penduduknya. Proporsi penduduk di wilayah ini dapat ditinjau berdasarkan aspek demografis, seperti distribusi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, hingga mata pencaharian. Analisis ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Berikut contoh distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2023:

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

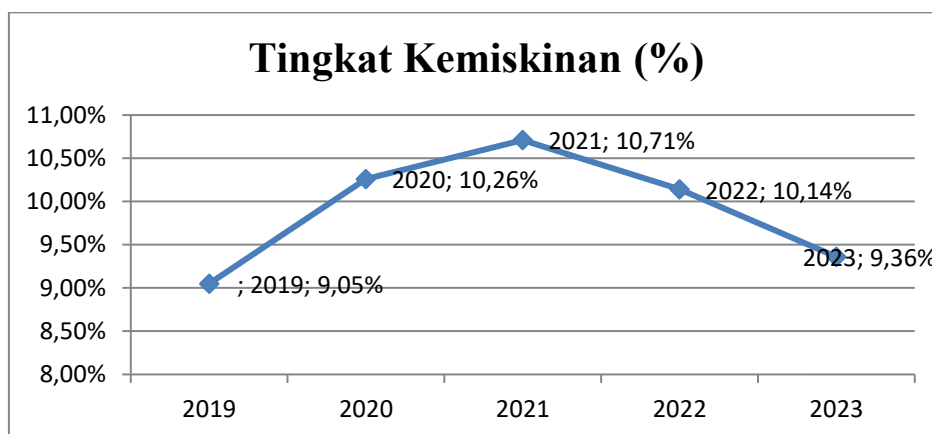
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	43.846	41.619	85.465
5-9	42.655	40.933	83.588
10-14	44.447	42.474	86.921
15-19	49.512	46.256	95.768
20-24	50.648	46.748	97.396
25-29	47.579	44.359	91.938
30-34	44.093	42.383	86.476
35-39	40.662	39.717	80.379
40-44	39.998	39.255	79.253
45-49	36.786	37.827	74.613
50-54	35.064	37.047	72.111
55-59	34.213	35.826	70.039
60-64	29.284	30.293	59.577
65-69	23.202	24.223	47.425
70-74	17.006	18.234	35.240
75+	14.820	17.226	32.046
<b>Kabupaten Sumedang</b>	<b>593.815</b>	<b>584.420</b>	<b>1.178.235</b>

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Kabupaten Sumedang memiliki total penduduk 1.178.235 jiwa, dengan komposisi cukup seimbang antara laki-laki (593.815 jiwa) dan perempuan (584.420 jiwa). Kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi dengan 62% dari total penduduk, sedangkan usia muda (0-14 tahun) mencapai 22% dan lansia (65 tahun ke atas) sebesar 9,7%. Kelompok usia 20-24 tahun adalah yang terbanyak, sementara usia 75 tahun ke atas memiliki jumlah terendah, yaitu 32.046 jiwa. Di dominasi kelompok usia produktif sebanyak 62% menjadi peluang besar untuk mendorong perekonomian, inovasi, dan berbagai program pembangunan. Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan semua kelompok diberdayakan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Pada kegiatan Keluarga Berencana (KB) yaitu untuk mempersiapkan masyarakat supaya terhindar dari 4T yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak salah satunya adalah dengan melakukan kontrasepsi sebagai cara atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Macam-macam alat kontrasepsi yaitu: Intrauterine device (IUD), kontrasepsi berbahan plastik yang berbentuk seperti huruf "T" dipasang di dalam rahim (IUD non-hormonal, dan IUD hormonal); Metode Operatif Wanita (MOW), metode kontrasepsi dengan cara operasi; Metode Operasi Pria (MOP), metode kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran cairan mani; Kondom, mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual; KB implan, alat kontrasepsi yang berbentuk batang plastik fleksibel yang dimasukkan ke dalam rahim; KB suntik, dilakukan melalui suntikan untuk mencegah terjadinya kehamilan; dan Pil KB, terdapat dua jenis yaitu pil kombinasi dan pil mini. Pelayanan KB ini dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah maupun swasta, seperti praktik mandiri bidan, rumah bersalin, dan pelayanan kesehatan lainnya. Meskipun pelayanan kontrasepsi sudah tersedia di banyak fasilitas kesehatan, masih terdapat kesenjangan dalam akses, terutama di daerah-daerah terpencil.

Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang belum mampu mengatasi masalah lapangan, terutama terkait kondisi kemandirian ekonomi keluarga yang masih rendah. Inovasi kegiatan yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan, akses permodalan, dan peluang usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mendukung masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang, yaitu:



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2023

**Gambar 1. 1Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023**

Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang meningkat dari 9,05% pada tahun 2019 menjadi 10,71% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah mencapai puncaknya, tingkat kemiskinan menurun bertahap menjadi 9,36% pada tahun 2023. Meskipun angka kemiskinan mulai menurun, efektivitas program BANGGA KENCANA belum optimal, terlihat dari belum tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga perlu peningkatan strategi dalam pelaksanaan program BANGGA KENCANA terutama meningkatkan UPPKA di desa-desa.

Kemiskinan di Kabupaten Sumedang turut mempengaruhi masalah pendidikan, yang menjadi faktor penting dalam kesuksesan program BANGGA KENCANA untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, tapi masih belum menjangkau dan mengatasi hambatan pendidikan di tingkat desa. Banyak keluarga masih kesulitan menjangkau akses pendidikan karena kurangnya dukungan pemerintah yang efektif. Berikut tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumedang:

**Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Sumedang per Juni 2024**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Persentase (%)</b>
S3	0,016%
S2	0,22%
S1	3,64%
D3	1,07%
D1 dan D2	0,3%
SMA	20,56%
SMP	18,0%
Tamat SD	30,14%
Belum Tamat SD	8,95%
Tidak/Belum Sekolah	17,11%

Sumber: *Databoks.katadata*

Mayoritas penduduk Kabupaten Sumedang berpendidikan jenjang dasar hingga menengah, dengan persentase tertinggi tamat SD (30,14%). Rendahnya tingkat pendidikan ini menggambarkan tantangan dalam implementasi program BANGGA KENCANA yang perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Rendahnya persentase penduduk berpendidikan tinggi mencerminkan belum efektifnya program BANGGA KENCANA terkait pentingnya perencanaan keluarga.

Upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui program BANGGA KENCANA, penting untuk melakukan pemantauan akurat terhadap kondisi kesehatan dan jumlah balita di Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi program BANGGA KENCANA dalam penerapan kebijakan pengendalian jumlah anak dalam keluarga. Dalam aplikasi data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat total balita tercatat di Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Balita Berdasarkan Umur (Bulan) November 2024**

<b>Balita Berdasarkan Umur (Bulan)</b>	<b>Jumlah</b>
0-5	3.296
6-11	5.635
12-23	13.796
24-59	44.369
> 59	0
<b>Total Balita Tercatat</b>	<b>67.096</b>

Sumber: *Data e-PPGBM Simpati Kabupaten Sumedang*

Data total balita yang tercatat sebanyak 67.096 anak dapat menunjukkan tantangan dalam penerapan kebijakan “2 anak cukup”. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk termasuk memastikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak secara optimal. Namun, angka yang tinggi terutama pada kelompok usia 24-59 bulan dan 12-23 bulan dapat mengindikasikan bahwa banyak keluarga masih memiliki lebih dari dua anak, hal ini juga rentan terjadinya stunting. Kurang edukasi yang efektif tentang manfaat jangka panjang pembatasan kelahiran, seperti kesehatan ibu dan anak serta kualitas hidup keluarga, menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi program BANGGA KENCANA. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang baik, dan rendahnya frekuensi penyuluhan di lapangan serta kemampuan PLKB dalam mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk menjadi akseptor KB.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Indikator kelompok sasaran program BANGGA KENCANA menunjukkan kurangnya inisiatif DPPKBP3A Kabupaten Sumedang dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif yang difasilitasi oleh

program BANGGA KENCANA, hal ini mengindikasikan kurangnya dorongan dari DPPKBP3A Kabupaten Sumedang.

2. Hasil sosialisasi program BANGGA KENCANA belum tercapai secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat serta minimnya pemahaman terhadap program yang disosialisasikan. Kondisi ini mencerminkan kurang maksimalnya upaya DPPKBP3A Kabupaten Sumedang dalam merancang metode komunikasi yang efektif serta menyesuaikan pendekatan sosialisasi dengan tingkat pendidikan masyarakat.
3. Pengawasan program BANGGA KENCANA belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah masyarakat yang menjadi akseptor KB serta kurangnya pemantauan terhadap keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Kondisi ini mencerminkan kurangnya upaya PLKB dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program BANGGA KENCANA. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya PLKB serta minimnya insentif yang diberikan oleh DPPKBP3A Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
2. Faktor yang menghambat Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menghambat Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

## 2. METHOD

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Pada studi lapangan peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, pada tahapan pengolahan data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah pegawai bidang transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Jumlah informan sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Advokasi, Informasi, dan Pergerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Program, dan Penyuluh Keluarga Berencana.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Menurut Hasibuan (Bormasa, 2022:132) Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Sejalan dengan pendapat Mahmudi (Hertati, 2019:22) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan Komaruddin (Anis, Usman, & Arfah, 2021:1108) berpendapat efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu aktivitas manajemen dalam mencapai tujuannya.

Keberhasilan dalam efektivitas program dapat diukur dari hasil yang telah dicapai. Hal tersebut sesuai pendapat Sutrisno berpendapat bahwa:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran

3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Untuk menunjukkan jawaban pada efektivitas program dilakukan pengukuran melalui efektivitas program menurut Budiani. Adapun ukuran faktor yang menentukan efektivitas program menurut Budiani (Rahayu et.al, 2024:52), sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keseluruhan dari Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

**Tabel 1. Kesimpulan dari Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang**

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Ketepatan sasaran program	Indikator kelompok sasaran	Sasaran program BANGGA KENCANA difokuskan pada perbaikan aspek-aspek ketahanan, kesejahteraan, serta kesehatan keluarga dari ketahanan keluarga dan KB. Kelompok ketahanan keluarga yaitu keluarga yang mempunyai balita, remaja, lansia, remaja itu sendiri dan pemberdayaan ekonomi.
		Pendataan kelompok	Pendataan kelompok dan keluarga yang sejahtera sudah baik, pendataan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Penggerak Desa (TPD). Pendataan ini dilakukan dua kali, yaitu yaitu setiap tahun dan setiap 5 tahun untuk pendataan lebih menyeluruh, dengan tim mendatangi rumah-rumah warga. Pada tahun 2024, Kabupaten Sumedang mencatatkan skor 60,29 dalam Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga).
2.	Sosialisasi Program	Kemampuan pelaksana program	Kemampuan pelaksana umumnya belum baik. Pelaksana P3K atau ASN secara materi lebih paham, sementara yang belum dilatih masih kurang. Meskipun sudah mengerti, pelaksana perlu hati-hati saat berinteraksi dengan masyarakat. Jika terdapat hambatan dibantu oleh kader dan Pos KB.
		Hasil sosialisasi	Dari hasil sosialisasi program BANGGA KENCANA telah mencapai target yang ditetapkan karena ada kelahiran baru, remaja ada yang menikah dan perubahan jumlah penduduk, yang menjadikan penggunaan alat kontrasepsi dan peningkatan PUS untuk program KB sangat penting untuk menjaga kestabilan pertumbuhan penduduk.
3.	Tujuan Program	Pemahaman responden	Tingkat pemahaman responden terhadap program BANGGA KENCANA belum baik, tetapi banyak tanggapan positif. Responden mulai memahami isi sosialisasi, meskipun perubahan perilaku tidak langsung terlihat seperti pada program fsik, ada kemajuan dibanding masa lalu, khususnya dalam penerimaan terhadap program KB.

		Kepuasan responden	Kepuasan responden terhadap program BANGGA KENCANA umumnya belum baik, meskipun ada yang tidak puas akibat efek samping penggunaan KB. Kepuasan ini terlihat dari kesiapan responden melaksanakan program dan tanggapan positif selama interaksi dengan masyarakat.
4.	Pemantauan program	Pengawasan program	Pengawasan program BANGGA KENCANA sudah baik, dilakukan secara rutin dan berjenjang oleh dinas, UPT, dan kecamatan. Mekanisme pengawasan mencakup pembinaan fasilitas kesehatan, pemantauan distribusi kontrasepsi, serta evaluasi program dan administrasi. Monitoring dilakukan minimal tiga bulan sekali, baik melalui kunjungan lapangan maupun kegiatan internal.
		Evaluasi hasil pengawasan	Evaluasi hasil pengawasan cukup baik, terus berinovasi dan dievaluasi tiap tahun untuk menurunkan kemiskinan, <i>zero stunting</i> , dan meningkatkan kesejahteraan. Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan untuk memastikan target tercapai, meski masih ada kekurangan dan target yang belum tercapai.

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2025

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang bahwa secara keseluruhan efektivitas program BANGGA KENCANA tersebut pelaksanaannya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program sebagai berikut:

Pertama, dimensi ketepatan sasaran terlihat sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan indikator kelompok sasaran dalam program BANGGA KENCANA terdiri dari ketahanan keluarga dan KB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera, kelompok ketahanan keluarga yaitu keluarga yang mempunyai balita, remaja, lansia, remaja itu sendiri dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, untuk indikator pendataan kelompok dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Penggerak Desa (TPD). Pendataan ini dilakukan dua kali, yaitu yaitu setiap tahun dan setiap 5 tahun untuk pendataan lebih menyeluruh, dengan tim mendatangi rumah-rumah warga. Sejalan dengan pendapat Budiani, sebagaimana diungkapkan oleh Makmur (Najidah & Lestari, 2019:6) "Penentuan sasaran yang tepat baik, yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri". Menurut Suharto (Najidah & Lestari, 2019:6) menjelaskan "Faktor yang mempengaruhi efektivitas program terdiri dari 4 kriteria, (1) Sasaran, (2) Koordinasi, (3) Sosialisasi, dan (4) Jumlah bantuan".

Kedua, dimensi sosialisasi program BANGGA KENCANA terdapat aspek yang belum optimal yaitu kemampuan pelaksana program, masih beragam PPPK dan ASN umumnya lebih memahami tugas, sementara yang belum dilatih masih terbatas, interaksi dengan masyarakat perlu kehati-hatian, hambatan di lapangan dapat dibantu oleh kader serta pos KB. Selain itu, mengenai hasil sosialisasi telah mencapai target terutama program KB, namun BK, BKR, BKL, IK-R, dan UPPKA belum merata di tiap wilayahnya karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080). Salah satu kunci keberhasilan dari efektivitas program yaitu kemampuan pelaksana program yang mumpuni, hal tersebut seperti diungkapkan oleh (Justiawal & Asmanurhidayani, 2023:147) "Melalui sosialisasi individu belajar menjadi anggota masyarakat, dimana prosesnya tidak semata mengajarkan pola perilaku sosial kepada individu tetapi juga mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya".

Ketiga, dimensi tujuan program sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang cukup terpenuhi, untuk indikator pemahaman responden terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18) bahwa tingkat pemahaman responden terhadap program BANGGA KENCANA belum merata, tetapi banyak tanggapan positif di lapangan. Kemudian, untuk indikator kepuasan responden sebagian besar merasa puas, meskipun ada yang tidak puas akibat efek samping penggunaan KB. Pemahaman responden sangat diperlukan agar dapat tertarik dengan program

BANGGA KENCANA, hal tersebut selaras dengan pernyataan Pasolong (Mardiyanto & Ismowati, 2017:188) “Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat”.

Keempat, dimensi pemantauan program belum optimal. Hal itu terlihat dari indikator pengawasan program sudah rutin dilakukan seperti terdapat dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak BAB III Pasal 3Ayat 3 Bagian (g). Selain itu, untuk indikator evaluasi hasil pengawasan belum cukup terpenuhi karena masih terdapat hal-hal yang belum tercapai, pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak BAB III Pasal 3Ayat 3 Bagian (b). Sejalan dengan pendapat Bako et al (Mustofa, Razimona, Nafi’ah, & Arifa, 2019:115) “Fungsi pengawasan antara lain untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, dan menindah penyalahgunaan serta penyelewengan, mendinamisasi organisasi dan seluruh kegiatan manajemen”. Selain itu, Arifin (Khosyiii, 2022:43) “Proses serta hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh beragam pemantauan, kerangka, dan profesionalisme evaluator itu sendiri”.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang ini secara keseluruhan sudah dilakukan dengan cukup baik namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Aspek yang sudah baik terdapat pada dimensi sasaran program BANGGA KENCANA dimana indikator kelompok sasaran program dan pendataan kelompok sudah berdasarkan pendataan keluarga yang dilakukan rutin oleh DPPKBP3A melalui aplikasi SIGA. Kemudian dari dimensi sosialisasi program, dimana masih perlu ditingkatkan yaitu dari sumber daya manusia pelaksana program yang masih perlu pelatihan. Lalu, pada dimensi tujuan program masih harus ditingkatkan lagi dalam hal pemahaman responden yang masih belum merata. Selanjutnya pada dimensi pemantaun program sudah baik dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan.
2. Faktor penghambat Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, dari sisi kebijakan, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta latar belakang pendidikan, kebiasaan masyarakat, serta ketimpangan partisipasi KB pria dan beragamnya karakteristik masyarakat. Dari sisi dimensi efisiensi waktu, tantangan meliputi keterbatasan waktu, hambatannya meliputi keterbatasan waktu, tempat, biaya, pegawai, sarana dan prasarana, serta kesulitan penyesuaian jadwal dan kondisi masyarakat, ditambah gangguan cuaca. Sementara itu, dimensi dukungan hambatannya tradisi dan nilai religius, internalnya seperti anggaran dan petugas, eksternalnya seperti kurangnya kerja sama dengan swasta, terbatasnya fasilitas, ruang kegiatan, dan kendaraan operasional. Kemudian, dimensi pembagian tugas menghadapi hambatan seperti kekurangan kader terlatih, beban kerja tidak seimbang, pembagian tugas yang belum optimal, rotasi pegawai, kualitas SDM yang belum merata, kondisi geografis, serta tekanan target.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan Efektivitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, dari dimensi isi kebijakan ditingkatkan melalui pelatihan, evaluasi, penyuluhan, media informasi, dukungan anggaran, materi yang mudah dipahami. Kemudian untuk dimensi efiseinsi waktu upayanya dengan menyelaraskan kegiatan masyarakat, evaluasi rutin, perencanaan matang, jadwal cadangan, dan komunikasi aktif. Lalu untuk

dimensi dukungan upayanya memperkuat pendekatan, koordinasi lintas sektor dan daerah, mengusulkan dana desa, memaksimalkan SIGA, dan bekerjasama dengan masyarakat. Terakhir, dimensi pembagian tugas ditingkatkan kemampuannya lewat pelatihan, pembagian tugas yang jelas, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk capai target program meski SDM terbatas.

## REFERENCES

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Jurnal Unismuh*, 1108.
- Arief, M. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja Tingkat Pendidikan dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Koperasi Guru dan Karyawan Pada Satuan Pendidikan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 173-186.
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada.
- Dewi, D. S. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dewi, D. S. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. DI Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Eisenberger. (2022). Fauzi, Muhamad. PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA PADA PT. MULTIGUNA INTERNATIONAL PERSADA KANTOR REGION JAWA TIMUR. *Journal of Applied Psychology*, 500-507.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol. 2 No. 3*, 73-86.
- Hasanah, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB 5.0*, 215-228.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Herpendi, & Habibah, R. (2019). Aplikasi Agenda Kegiatan Pada BPSDMPK komunikasi Dan Informatika Banjarmasin Berbasis Web. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 50-58.
- Hertati, D. (2019). *Buku Monograf Efektivitas Full*. Jawa Timur: Mitra Sumber Rejeki.
- Indriani, D. R., & Artisa, R. A. (2023). Efektivitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga. *Jurnal Good Governance Volume 19*, 184-196.
- Juni, I. A. (2017). Pengaruh Sistem Digital Dan Keamanan Arsip Terhadap Efisiensi Waktu Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. *Jurnal Administrasi Publik 2.2*, 81-90.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Khosyain, M. I. (2022). Evaluasi Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 42-46.
- Kusdinar, R. (2022). Efektivitas Program Transmigrasi Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration 7.1*, 1-6.
- Mardiyanto, R., & Ismowati, M. (2017). Analisis indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan kepuasan kualitas pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 188.
- Malawat. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary .
- Malian, S. (2021). *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Masni, H. (2017). Peran pola asuh demokratis orangtua terhadap pengembangan potensi diri dan kreativitas siswa. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 58-74.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press.
- Muhammad Justiawal, & Asmanurhidayani. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 145-154.
- Mulyadi. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mustari, & Nuryanti. (2016). *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

- Mustofa, A. A. (2016). Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. *Diss*, 12-22.
- Mustofa, Y., Razimona, T., Nafi'ah, D. U., & Arifa, Z. (2019). Pengawasan dan Evaluasi Program Bahasa Arab Untuk Peningkatan Berkelanjutan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang. *Jurnal Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab*, 115.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2015). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1-17.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review* 8.2, 69-87.
- Nonci. (2017). Efektivitas Formula Bacillus Subtilis TMS Untuk Pengendalian Penyakit Pada Tanaman Jagung. *Fitopatologi Indonesia*, 113-118.
- Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*, 39-59.
- Pauziah, U. (2018). PERANCANGAN SISTEM PENDATAAN PENDUDUK PADA KELURAHAN CILILITAN JAKARTA TIMUR BERBASIS DELPHI. *Journal Universitas INDRAPRATA PGRI*, 191.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, J. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pratama, N. A. (2021). Efektivitas Program Pelatihan Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 27.
- Putri, G. A., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). Literature view pengorganisasian: SDM, tujuan organisasi dan struktur organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 294.
- Putri, U. H. (2019). Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan. *Pendidikan Padang*, 1-5.
- Rahayu, C. S., Soebiyantoro, A., & Patony, T. (2024). Efektivitas program percepatan penurunan stunting di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 47-57.
- Ramadan, H. (2020). Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 1431.
- Rianto, M. R. (2020). Pengaruh religiusitas, pengaruh sosial dan dukungan pemerintah terhadap minat menabung di Bank Syariah Mandiri-Bekasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 76-83.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Rusli, B. (2017). *Kebijakan Publik membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Rusli, D., Sanusi, A., Haryono, D., & Andriani, D. (2021). Efektivitas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di UPT Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1735-1757.
- Sari, N. A. (2020). Sari, Nur Amaliyah. Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin*, 17.
- Seftia, B. T., & Arafat, Y. (2023). Pengaruh Kemampuan Dan Pembagian Tugas Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen dan Investasi (MANIVESTASI)*, 155.
- Setiawan, E., Risulam, A., & Nugraha, D. S. (2023). EFEKTIVITAS ORGANISASI TERMINAL TIPE C WADO PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 679-689.
- Silalahi, U. (2017). *Studi Ilmu Administrasi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Simarmata, N. (2023). *Konsep Dasar dan Karakteristik Penelitian Kualitatif*. Universitas Udayana: Tohar Media.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM. *Syntax idea*, 30-31.

- 
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, I. (2022). Pengorganisasian dalam Pendidikan. *Journal of Education and Teaching*, 23.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: Aura (CV Anugrah Utama Raharja).
- Widanti, N. P. (2022). *PRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK*. Bali: Jagat Langit Sukma.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik teori, proses, dan studi kasus: edisi revisi terbaru*. Jakarta: CAPS.
- Wira. (2015). Efektivitas Program Pendidikan Bina Lingkungan Pada Masyarakat Nelayan Keseluruhan Kota Karang Raya Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sosiologi*, 77-78.